BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga dinyatakan bahwasanya: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini menurut Marwan Effendy, di dalamnya terkandung makna bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan negara kekuasaan, serta ada beberapa unsur yang harus terpenuhi atas konsekuensi dinyatakannya Indonesia sebagai negara hukum, yaitu:

Adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹

Berdasarkan penjelasan Marwan Effendy di atas, negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui adanya prinsip supremasi hukum. Supremasi hukum dapat diartikan bahwa hukum berkuasa penuh atas negara dan rakyat.² Dengan demikian, dalam negara Indonesia (negara hukum) tidak seorangpun berada dan menempatkan diri di atas hukum, dan hukum harus ditegakkan kepada siapa pun tanpa terkecuali, serta dalam proses penegakan hukum itu

¹Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Cet. 1, Gaung Persada Press Group, Tangerang Selatan, 2014, hlm. 55.

²Subrata Kubung, *Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia*, Permata Press, Jakarta, 2019, hlm. 407.

sendiri juga harus berdasarkan hukum pula bukan dengan kekuasaan yang cenderung berbuat sewenang-wenang.

Begitu pula dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Aparat penegak hukum wajib tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Moeljatno, KUHAP telah memuat ketentuan hukum acara pidana yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana materiel.³ Lebih lanjut, R. Soesilo juga menjelaskan bahwa KUHAP merupakan kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkapan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan.
2. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.
3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya.⁴

Dengan adanya aturan hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP, hal ini pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara khususnya aparat penegak hukum dalam bertindak terhadap warga negara yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana. Sehingga tidak ada seorangpun

³Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Cet. 1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 3.

⁴*Ibid.*, hlm. 4.

aparatus penegak hukum yang boleh melakukan tindakan secara sewenang-wenang atau perbuatan yang dilakukan di luar ketentuan yang terdapat dalam KUHAP terhadap warga negara yang berurusan dengan hukum pidana.

Sama seperti halnya dengan seorang tersangka tindak pidana yang menjalani proses penyidikan. Meskipun karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup seseorang disangka melakukan kejahatan (tindak pidana), tersangka dalam menghadapi proses penyidikan tetaplah wajib diperlakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dalam KUHAP.

Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁵ Dalam melakukan proses penyidikan, KUHAP telah memberikan petunjuk tata cara kepada penyidik selaku aparat penegak hukum tentang bagaimana melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang, maupun pemeriksaan (proses interogasi) terhadap tersangka tindak pidana. Bukan hanya itu, KUHAP juga secara khusus telah mengatur hak-hak bagi tersangka yang menghadapi proses penyidikan, sehingga penyidik wajib menghormati dan melindungi hak-hak tersangka tersebut.

Berkenaan dengan diaturnya hak tersangka dalam KUHAP, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa:

⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Cet. 18, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 109.

KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari tindakan sewenang-wenang.⁶

Hak-hak tersangka sangat penting untuk dilindungi, karena memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka berarti mematuhi perintah KUHAP sekaligus memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta jaminan menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam proses penyidikan. Sehingga menurut Claudia Permata Dinda, Usman, dan Tri Imam Munandar, bahwa: “Dalam setiap proses penyidikan termasuk dalam hal pelaksanaan upaya paksa maupun proses interogasi, hak tersangka harus dilindungi dengan seksama dan juga hati-hati sesuai dengan perintah KUHAP dan teori perlindungan hukum yang mengedepankan Hak Asasi Manusia.”⁷

Ada banyak hak tersangka yang dimuat dalam KUHAP sebagaimana terdapat dalam BAB VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, seperti hak segera mendapatkan pemeriksaan, hak untuk diberitahukan apa yang disangkakan kepadanya, hak memberi keterangan secara bebas, hak mendapatkan bantuan hukum, hak menghubungi keluarga, dan lain-lain. Semua hak-hak yang diatur dalam KUHAP tersebut sangat penting bagi tersangka yang menjalani proses penyidikan, terutama hak mendapatkan bantuan hukum.

⁶*Ibid.*, hlm. 4.

⁷Claudia Permata Dinda, Usman, dan Tri Imam Munandar, “Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Pampas: Journal Of Criminal* Volume 1 No. 2, 2020, hlm. 88. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401>.

Yang dimaksud dengan hak tersangka mendapatkan bantuan hukum adalah hak mendapatkan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa dari seorang atau lebih penasihat hukum sehubungan dengan masalah hukum yang dihadapi tersangka.⁸ Bantuan hukum yang didapatkan tersangka pada dasarnya bukan bertujuan untuk membebaskan tersangka dari perkara hukumnya, akan tetapi bertujuan untuk membela hak-haknya sebagai manusia yang berstatus tersangka agar tidak dilanggar, juga membela tersangka apabila jika ada dan telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang.⁹ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady menjelaskan bahwa:

Hak mendapatkan bantuan hukum merupakan hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara kepada tersangka dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari penasihat hukum, sehingga tersangka tidak dirugikan haknya dalam proses hukum tersebut dan dapat menjalankan proses hukum secara yang tidak merugikan dirinya sehingga tercapai suatu ketentuan hukum berkeadilan.¹⁰

Hak tersangka mendapatkan bantuan hukum diatur secara khusus dalam KUHAP pada Pasal 54, Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 54: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama

⁸Deliani, “Hak Asasi Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum”, *Jurnal Hukum Pro Justitia* Volume 28 No.1, April 2010, hlm. 19. <https://media.neliti.com/media/publications/13120-ID-hak-asasi-tersangka-untuk-memperoleh-bantuan-hukum>.

⁹Heidy Visilia Sahangamu, “Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana”, *Lex Crimen* Vol. II No. 2, April-Juni 2013, hlm. 166. <https://media.neliti.com/media/publications/3031-ID-hak-tersangka-untuk-mendapatkan-bantuan-hukum-dalam-proses-penyidikan-perkara-pi>.

¹⁰Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 27.

dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pasal 56 Ayat (1):

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Pasal 114:

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Berdasarkan Pasal 54, Pasal 56 Ayat (1), dan Pasal 114 KUHAP tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan pembelaan dalam proses penyidikan, tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum. Dan penyidik berkewajiban memberitahukan kepada tersangka mengenai hak mendapatkan bantuan hukum atau bahwa tersangka dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, sebelum dimulainya pemeriksaan penyidikan. Selanjutnya penyidik dalam proses penyidikan wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri (agar mendapatkan bantuan hukum), dalam hal jika tersangka disangka melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau jika tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.

Diaturnya secara khusus dalam KUHAP mengenai hak tersangka mendapatkan bantuan hukum inilah yang harus menjadi perhatian sekaligus ditaati dan dilaksanakan oleh penyidik dalam bertindak terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Sehingga penyidik wajib menjamin terpenuhinya hak tersangka mendapatkan bantuan hukum, tidak menghambat tersangka dalam memperoleh haknya itu, dan sesuai Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, penyidik juga berkewajiban memenuhi hak tersangka mendapatkan bantuan hukum jika tersangka tidak dapat memenuhi haknya sendiri. Mengenai kewajiban penyidik memenuhi hak tersangka mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, M. Sofyan Lubis mengatakan bahwa:

Kewajiban penyidik untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka (memenuhi hak tersangka mendapatkan bantuan hukum) pada proses penyidikan tidak berlaku atau gugur apabila sebelum pemeriksaan penyidikan dimulai tersangka telah mempunyai penasihat hukum yang telah ia tunjuk sendiri atau atas tunjukan dari keluarga tersangka tersebut.¹¹

Meskipun sudah ada perintah tegas dari KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka memiliki hak mendapatkan bantuan hukum dalam menjalani proses penyidikan, kenyataannya masih ditemukan bahwa ada tersangka yang menjalani proses penyidikan belum dapat memiliki atau menikmati hak mendapatkan bantuan hukum khususnya tersangka yang disangkakan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lima belas tahun, seperti tersangka tindak pidana pembunuhan yang diancam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan: “Barangsiapa dengan

¹¹M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Cet. 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 38.

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara lima belas tahun.”

Hal ini dapat dilihat dari tersangka tindak pidana pembunuhan yang menjalani proses penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat. Data yang diperoleh dari Satuan Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel
Data Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan
Di Polres Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 – 2021

No.	Tahun	Jumlah Tersangka	Mendapatkan Bantuan Hukum	Tidak Mendapatkan Bantuan Hukum
1	2017	3	2	1
2	2018	-	-	-
3	2019	2	-	2
4	2020	-	-	-
5	2021	-	-	-
Jumlah		5	2	3

Sumber: Polres Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan dari data di atas, dapat dilihat bahwasanya ada tersangka tindak pidana pembunuhan yang menjalani proses penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat tidak mendapatkan bantuan hukum. Padahal jika merujuk pada Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, penyidik Polres Tanjung Jabung Barat berkewajiban memenuhi hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada proses penyidikan dengan menunjuk atau menyediakan penasihat hukum yang dibutuhkan tersangka, dalam hal jika tersangka tindak pidana pembunuhan tidak mampu memenuhi haknya tersebut atau tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Berdasarkan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dalam sebuah skripsi yang

berjudul “**Pemenuhan Hak Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Barat.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat?
2. Apa sajakah kendala yang dialami dalam pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagaimana berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami dalam pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ada 2 (dua) macam yaitu:

a. Manfaat Teoretis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi atau kontribusi dalam menambah keilmuan khususnya dalam bidang hukum acara pidana terkait pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian dengan konsentrasi sejenis di waktu yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Lembaga Kepolisian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi penyidik kepolisian dalam hal pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan bantuan hukum pada tingkat penyidikan.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait adanya hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu:

1. Hak

Dalam kamus hukum, yang dimaksud dengan hak adalah: “Kebebasan untuk berbuat sesuatu berdasarkan hukum; kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.”¹²

2. Tersangka

Dalam Pasal 1 Angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian tersangka adalah: “Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

3. Tindak Pidana

Menurut Teguh Prasetyo, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah:

Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹³

Sedangkan menurut Rizky Amalia, Hafrida, dan Elizabeth Siregar, tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan:

¹²Subrata Kubung, *Op.Cit.*, hlm. 167.

¹³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 6, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 50.

Suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan yang ditunjukkan kepada perbuatannya dan sanksi ditunjukkan orang yang menimbulkan perbuatan.¹⁴

Selain pendapat-pendapat di atas, Djoko Prakoso juga menjelaskan bahwa:

Pengertian tindak pidana secara yuridis adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi, dan pengertian tindak pidana secara kriminologis adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat.¹⁵

5. Pembunuhan

Dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan pembunuhan adalah: “Seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.”

6. Bantuan Hukum

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa: “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.”

Menurut Clarence J. Dias, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah:

¹⁴Rizky Amalia, Hafrida, dan Elizabeth Siregar, “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia”, *Pampas: Journal Of Criminal* Volume 2 No. 2, 2021, hlm. 5. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13334/11937>.

¹⁵Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 4, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 1.5.

Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.¹⁶

Di sisi lain mengenai pengertian bantuan hukum, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa:

Bantuan hukum yang dimaksud KUHAP meliputi pemberian bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana:

- a. baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin;
- b. maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa.¹⁷

7. Penyidikan

Dalam Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian penyidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, pengertian penyidikan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

Pertama, penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya; Kedua, penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari

¹⁶Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Cet. 3, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 10.

¹⁷M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 348.

resepsi kriminal polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa judul skripsi ini memiliki arti bagaimana upaya memenuhi hak seseorang yang disangka melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum (penasihat hukum) pada tingkat penyidikan, khususnya tingkat penyidikan yang ada di Polres Tanjung Jabung Barat.

E. Landasan Teoretis

Landasan teoretis merupakan suatu gambaran atau konsep yang digunakan sebagai pondasi atau akar dalam sebuah penelitian. Landasan teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Bahder Johan Nasution, salah satu tujuan negara menciptakan hukum adalah sebagai sarana atau instrumen perlindungan bagi warga negara terhadap tindakan penguasa yang sewenang-wenang.¹⁹ Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk layanan yang wajib diberikan oleh negara, untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara.²⁰ Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh CST Kansil sebelumnya bahwa “perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum

¹⁸Suswantoro, Slamet Suhartono, dan Fajar Sugianto, “Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 1 No.1, Agustus 2018, hlm. 44. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/1768>.

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 258.

²⁰Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Pampas: Journal Of Criminal* Volume 2 No.1, 2021, hlm. 30. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684/10898>.

yang harus diberikan negara atau aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”²¹

Dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek perlindungan hukum yang harus mendapat perhatian, yaitu:

Pertama, warga negara memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan warga negara; kedua, warga negara memerlukan perlindungan terhadap sifat bahaya seseorang; ketiga, warga negara memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari aparat penegak hukum maupun dari warga negara pada umumnya; keempat, warga negara memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.²²

Dari penjelasan Barda Nawawi Arief di atas, dapat dilihat bahwasanya warga negara memerlukan perlindungan hukum dari berbagai aspek. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara merupakan hal yang sangat penting bagi warga negara. Karena menurut Philipus M. Hadjon, “Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.”²³

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap warga negara dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

²¹<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 20 Februari Pukul 20.15 WIB.

²²Jovan J.S.T.Y Rakian, “Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana”, *Lex Crimen* Vol. V No. 2, Februari 2016, hlm. 151. <https://media.neliti.com/media/publications/3428-ID-hak-hak-tersangka-dalam-proses-penyidikan-tindak-pidana>.

²³<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh-dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>. Diakses pada tanggal 20 Februari Pukul 20.00 WIB.

Pertama, perlindungan hukum preventif yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan penguasa mendapat bentuk yang definitif artinya bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa; kedua, perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam negara hukum, segala tindakan penguasa, aparat penegak hukum, dan semua warga negara diatur oleh hukum dan hukum ditegakkan kepada siapa pun tanpa terkecuali. Menurut Sudikno Mertokusumo:

Hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan manusia dan dengan penegakan hukum maka hukum menjadi kenyataan, serta yang terpenting bahwa ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁵

Dari pendapat Sudikno Mertokusumo di atas, kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai pemberlakuan hukum secara pasti, jelas (tidak multitafsir), serta diterapkan secara tegas dan konsisten. Menurut Gustav Radbruch, “Kepastian hukum dimaknai di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.”²⁶

Pentingnya terpenuhi kepastian hukum dalam penegakan hukum, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan bagi seseorang terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga

²⁴Bahder Johan Nasution, *Loc.Cit.*

²⁵Ayu Veronica, Kabib Nawawi, dan Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster”, *Pampas: Journal Of Criminal* Volume 1 No. 3, 2020, hlm. 46. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>.

²⁶R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 13 No. 2, Juni 2016, hlm. 194. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151>.

seseorang tersebut diperlakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²⁷ Dengan demikian, dengan adanya kepastian hukum maka berdasarkan aturan hukum seseorang tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, maka seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan timbulah ketidakpastian hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan akibat ketidakjelasan aturan hukum.²⁸ Sehingga Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki 2 (dua) fungsi:

Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan penguasa dan aparat penegak hukum karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh penguasa dan aparat penegak hukum terhadap individu.²⁹

Berjalan mulusnya kepastian hukum sangat penting artinya bagi penegakan hukum. Untuk itu Jan M. Otto mengatakan bahwa ada 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi agar kepastian hukum dapat dicapai dalam penegakan hukum, yaitu:

Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara; bahwa instansi-instansi penguasa menerapkan aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; bahwa mayoritas warga pada pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut; bahwa

²⁷*Ibid.*

²⁸Mari Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido* Volume 1 No.1, Juli 2019, hlm. 15. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 137.

hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.³⁰

Berdasarkan pendapat Jan M. Otto di atas, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum pada dasarnya dapat tercapai jika:

- a. Penguasa menerbitkan aturan hukum yang jelas atau jernih, serta juga tunduk dan patuh kepada aturan hukum tersebut.
- b. Aparat penegak hukum menegakkan aturan hukum secara pasti dan konsisten, serta juga tunduk dan patuh kepada aturan hukum tersebut.
- c. Warga negara tunduk dan patuh kepada aturan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya di Polres Tanjung Jabung Barat.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris, artinya penulis meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan, yang kemudian disandingkan dengan pemenuhan hak tersangka tindak pembunuhan tersebut dilapangan.

³⁰Leo Arwansyah, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia", *Pampas: Journal Of Criminal* Volume 1 No. 3, 2020, hlm. 24. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11073/10257>.

3. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif artinya penelitian bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu. Untuk itu dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang terjadi di Polres Tanjung Jabung Barat dalam hal pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian (responden). Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari penyidik Polres Tanjung Jabung Barat, tersangka tindak pidana pembunuhan, dan penasihat hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari penelitian kepustakaan, melalui penelitian terhadap:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.”³¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan “semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”³² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang berkaitan dengan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis tidak meneliti semua anggota populasi, penulis hanya mengamati sebagian dari populasi (sampel). Teknik penarikan

³¹Hartiwiningsih, Lego Karjoko, dan Soehartono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2020, hlm. 9.19.

³²*Ibid.*, hlm. 9.24.

sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, “artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.”³³ Dengan demikian, yang menjadi sampel penelitian dalam penelitian ini adalah penyidik Polres Tanjung Jabung Barat yang memiliki kewajiban memenuhi hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan, dan tersangka tindak pidana pembunuhan yang memiliki hak mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan. Mengenai sampel dalam penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Tersangka tindak pidana pembunuhan sebanyak 2 (dua) orang. Sampel ditentukan dengan memilih responden terdekat yang dijumpai pertama kali saat itu (accidental sampling).
- c. Penasihat hukum sebanyak 1 (satu) orang.

6. Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen artinya mempelajari dokumen berupa putusan pengadilan, undang-undang, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mempelajari undang-undang dan dokumen penting lainnya yang

³³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159.

berkaitan dengan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung, dan yang menjadi responden adalah penyidik Polres Tanjung Jabung Barat yang berkewajiban memenuhi hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan, tersangka tindak pidana pembunuhan yang memiliki hak mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan, dan penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum kepada tersangka.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penganalisisan yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan berdasarkan data yang telah terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi skripsi ini secara umum, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, selanjutnya uraian landasan teoretis, kemudian metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

- BAB II:** Dalam bab tinjauan pustaka ini akan dijabarkan tinjauan umum tentang tersangka, tindak pidana pembunuhan, bantuan hukum, dan penyidikan.
- BAB III:** Bab pembahasan ini berisi hasil penelitian berupa pembahasan mengenai pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Barat, serta kendala-kendala yang dialami dalam pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan tersebut.
- BAB IV:** Bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TERSANGKA, TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, BANTUAN HUKUM, DAN PENYIDIKAN

A. Tinjauan Tentang Tersangka

Menurut Pasal 1 Angka 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka adalah: “Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah: “Seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.”³⁴

Adapun menurut Darwin Prints, tersangka adalah: “Seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).”³⁵

Sebagai seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tersangka tetap memiliki hak-hak yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga apabila hak-hak ini tidak dipenuhi, maka sudah mengingkari perintah KUHAP dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu hak-hak tersangka harus tetap dijamin, dilindungi dan dihormati, demi tegaknya aturan KUHAP dan perlindungan hak asasi manusia.

³⁴Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hlm. 53.

³⁵*Ibid.*

Membicarakan hak tersangka sebagaimana yang diatur dalam BAB VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Hak Tersangka Segera Mendapat Pemeriksaan

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka:

- a. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik (Pasal 50 Ayat (1) KUHAP).
- b. Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan (Pasal 50 Ayat (2) KUHAP).

2. Hak Tersangka Untuk Melakukan Pembelaan

Untuk kepentingan pembelaan tersangka, KUHAP memuat beberapa hak dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 57, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya (Pasal 51 KUHAP). Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka.
- b. Berhak memberi keterangan dengan bebas dalam pemeriksaan penyidikan (Pasal 52 KUHAP). Hak kebebasan memberi keterangan, dapat diartikan memberi keterangan yang dianggap tersangka paling menguntungkan baginya. Menurut M. Yahya Harahap, “ketentuan Pasal 52 KUHAP tersebut pasti akan tetap merupakan rumusan semu selama mentalitas aparat penegak hukum tidak menyesuaikan diri dengan semangat dan

jiwa yang dikehendaki KUHAP.”³⁶ Oleh karena itu, jaminan utama tentang hak kebebasan tersangka memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan, titik beratnya tergantung pada mentalitas para pejabat (penyidik) yang melakukan pemeriksaan penyidikan.

- c. Berhak mendapat juru bahasa dalam pemeriksaan penyidikan (Pasal 53 KUHAP). Adalah suatu hal yang tak mungkin bagi seseorang tersangka untuk membela kepentingannya, jika terhadap dirinya diajukan dan dituduhkan sangkaan yang tak dimengerti olehnya.
- d. Berhak mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP). Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasihat hukum pada pemeriksaan penyidikan (sejak taraf pemeriksaan penyidikan dimulai), dan dalam setiap waktu yang diperlukan.
- e. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum (Pasal 55 KUHAP).

Menurut M. Yahya Harahap:

Ketentuan Pasal 55 KUHAP ini dapat menimbulkan cacat dalam praktik penegakan hukum. Karena kebebasan memilih penasihat hukum pada umumnya hanya mampu dilakukan oleh orang yang kaya, yang dengan kekayaannya itu dia mampu memilih dan membiayai penasihat hukum yang diinginkannya. Sedangkan orang miskin untuk membiayai penasihat hukum yang murah saja dia tidak mampu apalagi memilih atau membiayai penasihat hukum yang diinginkannya.³⁷

Sehingga jaminan utama kebebasan memilih penasihat hukum bagi tersangka yang miskin atau tidak mampu, tergantung pada apakah

³⁶M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 332.

³⁷*Ibid.*, hlm. 334.

pejabat (penyidik) yang melakukan pemeriksaan penyidikan dapat mentaati KUHAP dan mengedepankan hak asasi manusia.

- f. Berhak wajib dipenuhi hak mendapatkan bantuan hukum (Pasal 56 KUHAP). Hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dalam pemeriksaan penyidikan, pemenuhan haknya dibebankan kewajiban kepada pejabat (penyidik) yang melakukan pemeriksaan penyidikan jika:
1. Tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri (Pasal 56 Ayat (1) KUHAP).
 2. Tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri (Pasal 56 Ayat (1) KUHAP).

Dengan demikian, penyidik yang melakukan pemeriksaan penyidikan berkewajiban memenuhi hak tersangka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP untuk mendapatkan bantuan hukum dengan menunjuk atau menyediakan penasihat hukum yang dibutuhkan tersangka. Mengenai kewajiban penyidik dalam pemeriksaan penyidikan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa:

Pada kewajiban yang pertama tidak tergantung pada ketidakmampuan tersangka mendapatkan penasihat hukum. Semata-mata kewajiban menunjuk penasihat hukum digantungkan pada beratnya ancaman hukuman. Pokoknya jika tindak pidana yang diancamkan kepadanya hukuman mati atau hukuman penjara lima belas tahun atau lebih, tersangka wajib

mendapat bantuan dari penasihat hukum, baik atas usahanya sendiri maupun atas penunjukan pejabat yang bersangkutan. Lain halnya pada sifat kewajiban yang kedua, kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka digantungkan pada dua syarat. Syarat pertama digantungkan pada keadaan “ketidakmampuan” tersangka menyediakan penasihat hukum. Kalau tersangka dianggap mampu, tidak ada kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum. Syarat kedua, digantungkan kepada beratnya ancaman hukuman, lima tahun atau lebih. Kalau ancaman hukuman pidana yang disangkakan lima tahun atau lebih, dan dia tidak mampu menyediakan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan “wajib” menunjuk penasihat hukum baginya.³⁸

Penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik dalam pemeriksaan penyidikan, memberi bantuan hukum kepada tersangka secara cuma-cuma (Pasal 56 Ayat (2) KUHAP). Artinya tersangka tidak dibebani untuk membayar jasa penasihat hukum yang disediakan penyidik, sehingga tersangka mendapatkan bantuan hukum secara gratis.

g. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 64 KUHAP).

3. Hak Tersangka Yang Berada Dalam Penahanan

Hak-hak tersangka yang telah dijelaskan sebelumnya di atas adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka baik yang berada dalam penahanan atau di luar penahanan. Di samping hak-hak tersangka yang umum tersebut, KUHAP telah memberi hak-hak yang melindungi tersangka yang berada dalam penahanan yaitu:

³⁸*Ibid.*, hlm. 335.

- a. Berhak menghubungi penasihat hukum (Pasal 57 Ayat (1) KUHAP). Jika tersangka berkebangsaan asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi jalannya proses pemeriksaan (Pasal 57 Ayat (2) KUHAP).
- b. Berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya, atau kepada orang yang serumah dengannya, atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya (Pasal 59 KUHAP).
- c. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP).
- d. Berhak menghubungi pihak keluarga, dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).
- e. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka, yaitu untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).
- f. Berhak mengirim surat kepada penasihat hukum dan sanak keluarganya, dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarganya, setiap

kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 Ayat (1) KUHAP).

g. Berhak atas kebebasan surat menyurat (Pasal 62 Ayat (2) KUHAP). Surat menyurat antar tersangka dan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak boleh diperiksa penyidik kecuali cukup alasan menduga bahwa surat-menyurat tersebut disalahgunakan. Dengan adanya kecurigaan penyalahgunaan surat-menyurat, menjadi penyebab hapusnya larangan bagi pejabat yang berwenang (penyidik) untuk membuka dan memeriksa hubungan surat-menyurat antar tersangka dengan penasihat hukum atau dengan sanak keluarganya. Kalau suatu surat yang diduga berisi penyalahgunaan, dan kemudian surat tersebut “ditilik” atau diperiksa oleh pejabat yang bersangkutan (penyidik) maka pembukaan atau pemeriksaan surat itu harus diberitahukan kepada tersangka, dan kemudian surat itu dikrim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik” (Pasal 62 Ayat (3) KUHAP).

h. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

4. Hak Tersangka Menuntut Ganti Rugi Dan Rehabilitasi

KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP) apabila penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini berlaku di Indonesia disebut sebagai suatu pembunuhan (tindak pidana pembunuhan).

Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.³⁹

Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu (KUHP) sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief-gefolg* atau sebagai akibat konstitutif.⁴⁰

Dari uraian di atas kiranya juga sudah jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil atau suatu *materieell delict* ataupun yang oleh Van Hamel juga telah disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya “delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.”⁴¹

³⁹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*, hlm. 2.

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Mengenai *opzet* dari seorang pelaku yang harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud di atas, Simons berpendapat, “bahwa apakah pada seorang pelaku itu terdapat *opzet* seperti itu atau tidak, hal mana masih digantungkan pada kenyataan, yakni apakah orang dapat terpenuhi adanya *voorwaardelijk opzet* atau tidak.”⁴²

Voorwaardelijk opzet itu merupakan suatu kata lain bagi *opzet bij mogelijksbewustzijn* atau yang oleh para penganut *wilshtheorie* juga disebut sebagai *dolus eventualis*.⁴³

Mengenai *voorwaardelijk opzet* seperti yang dimaksudkan oleh Prof. Simons di atas itu, menurut doktrin, orang baru dapat berbicara tentang adanya *opzet* semacam itu jika pada diri seorang pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain dari pada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang. Jika akibat yang lain itu kemudian benar-benar timbul, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai mempunyai suatu *voorwaardelijk opzet* terhadap timbulnya akibat lain.⁴⁴

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 3.

Tindak pidana pembunuhan itu sendiri secara umum diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
2. Tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan, diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menentukan:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

3. Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
4. Tindak pidana pembunuhan anak, diatur dalam Pasal 341 KUHP yang menentukan: “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja

merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

5. Tindak pidana pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dulu, diatur dalam Pasal 342 KUHP yang menentukan:

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

6. Keikutsertaan dalam tindak pidana pembunuhan anak, diatur dalam Pasal 343 KUHP yang menentukan: “Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.”
7. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam Pasal 344 KUHP yang menentukan: “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
8. Kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri, diatur dalam Pasal 345 KUHP yang menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang lain itu jadi bunuh diri.”
9. Tindak pidana menyebabkan atau menyuruh menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan, diatur dalam Pasal 346 KUHP yang menentukan: “Seorang wanita yang sengaja

menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

10. Tindak pidana menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan, tanpa izin wanita yang mengandung, diatur dalam Pasal 347 KUHP yang menentukan:

- (1). Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

11. Tindak pidana menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan, dengan izin wanita yang mengandung, diatur dalam Pasal 348 KUHP yang menentukan:

- (1). Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

12. Keterlibatan seorang dokter, bidan atau ahli meramu obat-obatan dalam tindak pidana pengguguran kandungan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan, diatur dalam Pasal 349 KUHP yang menentukan:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal ini dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

13. Hukuman pencabutan hak, diatur dalam Pasal 350 KUHP yang menentukan: “Dalam hal pembedaan karena pembunuhan, karena

pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5.”

C. Tinjauan Bantuan Hukum

Menurut Bambang Sunggono dan Aries Harianto, setidaknya ada dua hal penting berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas, yaitu:

Pertama, ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga Negara Republik Indonesia; Kedua, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.⁴⁵

Sementara itu, bantuan hukum dalam pengertian yang sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: “bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang tersangka atau terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) atau dalam proses pemeriksaan perkaranya dimuka pengadilan.”⁴⁶

Apabila dikaji lebih lanjut, pada dasarnya pemopuleran istilah “bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah “*legal aid*” dan “*legal assistance*” yang dalam praktik keduanya mempunyai orientasi yang berbeda satu sama lain. Menurut M. Yahya Harahap:

Legal aid biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang

⁴⁵Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 9.

hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu (miskin), ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat kepada mereka yang mampu membayar prestasi (honorarium).⁴⁷

Selain istilah “*legal aid*” dan “*legal assistance*” yang telah dijelaskan di atas, Clarence J. Dias memperkenalkan pula istilah “*legal service*” yang lebih tepat diartikan sebagai “pelayanan hukum”. Menurut Dias, *legal service* merupakan: “Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.”⁴⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memuat ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini, tidak begitu jelas memberi definisi bantuan hukum. Tidak dibedakan antara *legal aid*, *legal assistance*, dan *legal service*. Yang dijumpai hanya pengertian umum saja. Bantuan hukum yang dimaksud dalam KUHAP yaitu meliputi pemberian bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana, baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu, maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa.

⁴⁷M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 344.

⁴⁸Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

Sebelum berlakunya KUHAP, pengaturan mengenai bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di Indonesia diatur dalam HIR maupun dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam HIR, pengaturan mengenai bantuan hukum dirumuskan dalam Pasal 250. Namun HIR hanya memperkenankan hak bantuan hukum kepada terdakwa di hadapan proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Sedang kepada tersangka pada proses tingkat pemeriksaan penyidikan, HIR belum memberi hak untuk mendapat bantuan hukum. Dengan demikian HIR belum memberi hak untuk mendapatkan dan berhubungan dengan seorang penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Hanya sebatas sesudah memasuki taraf pemeriksaan di sidang pengadilan. Demikian juga “kewajiban” bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasihat hukum (memenuhi hak bantuan hukum), hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Di luar tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menunjuk penasihat hukum memberi bantuan hukum kepada terdakwa.
2. Dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, pengaturan mengenai bantuan hukum di atur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Namun dalam UU tersebut, peraturan pelaksanaan dan tata cara pemberian bantuan hukum belum diatur, seperti dalam hal penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap tersangka sejak penyidikan, dan lain-lain. Sehingga waktu itu sering terjadi pertentangan

antara pemberi bantuan hukum (penasihat hukum atau advokat) dengan para pejabat yang melakukan pemeriksaan perkara pidana.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan bantuan hukum dalam HIR maupun dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 masih memiliki kekurangan dan kekosongan di dalam peraturan pelaksanaan. Sehingga banyak langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pembentuk undang-undang untuk memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan mengenai pengaturan bantuan hukum, hingga lahirnya KUHAP pada akhir tahun 1981.

KUHAP yang berlaku sekarang ini, di dalamnya dimuat beberapa pasal dan ayat yang mengatur tentang bantuan hukum. Mengenai ketentuan bantuan hukum dalam KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengenai hak tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum, mengenai kewajiban pejabat yang melakukan pemeriksaan perkara pidana untuk memenuhi hak tersangka atau terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum (bantuan hukum cuma-cuma), ataupun mengenai hak-hak lainnya yang berkaitan dengan bantuan hukum, diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 114 KUHAP. Oleh karena itu ketentuan itu harus dapat dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan.
2. Waktu pemberian bantuan hukum terdapat dalam Pasal 69 dan Pasal 70 Ayat (1) KUHAP. Menurut ketentuan pasal tersebut, bahwa bantuan hukum kepada seseorang yang tersangkut suatu perkara pidana sudah dapat

diberikan bantuan hukum sejak saat ditangkap atau ditahan. Dan penasihat hukum dapat berhubungan dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.

3. Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diatur di dalam Pasal 70 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 71 KUHAP. Dalam ketentuan ini dimaksudkan agar penasihat hukum benar-benar memanfaatkan hubungan dengan tersangka untuk kepentingan pemeriksaan, bukan menyalahgunakan haknya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam pemeriksaan.
4. Wujud dari bantuan hukum atau perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh penasihat hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh tersangka atau terdakwa yaitu:
 - a. Dalam Pasal 115 KUHAP, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik dengan melihat dan mendengar, kecuali tersangka diduga melakukan kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum hanya dapat melihat, tetapi tidak dapat mendengar.
 - b. Dalam Pasal 123 KUHAP, penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan.
 - c. Dalam Pasal 79 Jo. Pasal 124 KUHAP, penasihat hukum dapat mengajukan permohonan untuk diadakan praperadilan.
 - d. Penasihat hukum dapat mengajukan penuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi buat tersangka atau terdakwa sehubungan dengan Pasal 95, Pasal 97, Jo. Pasal 79 KUHAP.

- e. Penasihat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima sesuai yang diatur dalam Pasal 156 KUHAP.
- f. Dalam Pasal 182 KUHAP, penasihat hukum dapat mengajukan pembelaan.
- g. Dalam Pasal 233 KUHAP, penasihat hukum dapat mengajukan banding.
- h. Dalam Pasal 245 KUHAP, penasihat hukum dapat mengajukan kasasi.

Meskipun KUHAP telah mengatur berbagai hal mengenai bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana, namun KUHAP tidak mengatur sanksi atau akibat hukum jika pejabat yang melakukan pemeriksaan perkara pidana tidak melaksanakan kewajiban memenuhi hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP.

Akibat hukum atas konsekuensi pejabat yang melakukan pemeriksaan perkara pidana tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana perintah dari Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, hanya dinyatakan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjadi Yurisprudensi sebagaimana berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan: “apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa bila tidak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di damping penasihat hukum.

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/ Pid.Sus/2011 menyatakan:

Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula.

Berdasarkan pada beberapa putusan Mahkamah Agung di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila pejabat yang melakukan pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak tersangka atau terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, maka pemeriksaan yang dilakukan pejabat tersebut dinyatakan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*) karena bertentangan dengan hukum acara (*undue process*).⁴⁹

Di samping kewajiban pejabat pemeriksa perkara pidana untuk memenuhi hak tersangka atau terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, seorang tersangka atau terdakwa yang akan dipenuhi haknya tersebut oleh pejabat pemeriksa perkara

⁴⁹M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 339.

pidana juga harus tetap memperhatikan dan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menentukan:

- (1). Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (2). Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

D. Tinjauan Tentang Penyidikan

Dalam Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dilihat bahwa penyidik merupakan aparat penegak hukum yang berwenang penuh melakukan penyidikan. Siapa saja yang dapat disebut sebagai penyidik, Pasal 6 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik terdiri dari pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Selanjutnya Pasal 11 KUHAP juga menjelaskan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diangkat menjadi “penyidik pembantu”, dapat juga berwenang melakukan penyidikan kecuali dalam hal melakukan

penahanan. Penyidik pembantu dapat melakukan penahanan apabila diberikan pelimpahan wewenang dari penyidik. Selain itu, Pasal 12 KUHAP menerangkan bahwa dalam hal menyerahkan berkas perkara (hasil penyidikan) yang telah dibuat, penyidik pembantu tidak dapat menyerahkan berkas perkara tersebut secara langsung kepada penuntut umum melainkan melalui penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Selain aparat penyidik yang ditentukan dalam KUHAP, ada juga aparat penyidik yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 menyebutkan bahwa aparat penegak hukum yang memiliki wewenang melakukan penyidikan terdiri dari penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dari pengertian penyidikan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP, secara umum penyidik memiliki tugas utama dalam melaksanakan proses penyidikan, sebagai berikut:

1. Mencari dan mengumpulkan yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
2. Menemukan tersangka.⁵⁰

Untuk mendukung tugas utama yang telah dijelaskan di atas, baik penyidik polisi negara Republik Indonesia (Pasal 6 Ayat (1) huruf a) maupun

⁵⁰Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 11.

penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 6 Ayat (1) huruf b), diberi kewenangan-kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP, sebagai berikut:

- (1). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan dalam pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf a.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (sehari-hari dikenal dengan nama SPDP/Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP).

Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk

dilimpahkan kepada penuntut umum (Kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana.⁵¹

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidikan dihentikan demi hukum atau pemberhentian penyidikan, dan hal ini diberitahukan kepada penuntut umum, serta diberitahukan juga kepada tersangka, keluarga tersangka maupun penasihat hukum tersangka.⁵²

Atas pemberhentian penyidikan tersebut, jika penuntut umum atau pihak yang berkepentingan merasa tidak setuju, maka dapat mengajukan “Praperadilan” kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah adanya, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidik maka penyidikan wajib dilanjutkan.⁵³

Setelah selesai dilakukan penyidikan, berkas perkara (hasil penyidikan) diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 8 Ayat (2) KUHAP). Penyerahan ini dilakukan dua tahap, yakni:

- a. tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. tahap kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.⁵⁴

⁵¹*Ibid.*, hlm. 13.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat:

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk (penuntut umum menerbitkan P-18 dan P-19).
- b. Melengkapi sendiri dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 30 Ayat 1 Huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI).⁵⁵

Berdasarkan Pasal 110 Ayat 4 KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara (hasil penyidikan) kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 14.